



LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PANJA BUMN ENERGI

KOMISI VI DPR RI

KE PROVINSI JAWA TIMUR (BOJONEGORO)

27 - 29 MEI 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

2021



LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PANJA BUMN ENERGI KOMISI VI DPR RI

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK

DI PROVINSI JAWA TIMUR (BOJONEGORO)

Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021

Tanggal 27–29 Mei 2021

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan Kerja

Undang-Undang No. 13/2019 dan pasal 60 peraturan DPR nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib mengatur bahwa komisi dalam melaksanakan tugas dibidang pengawasan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat dapat melakukan kunjungan kerja dalam masa sidang.

Keputusan Rapat Intern Komisi VI DPR RI mengenai Sasaran dan Obyek Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI di dalam Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020 – 2021.

B. Objek Kunjungan Kerja.

Objek kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI adalah PT Perusahaan Gas Negara Tbk di zona regional Provinsi Jawa Timur (Bojonegoro).

C. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja

Secara umum maksud dan tujuan kunjungan kerja ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang realisasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dan rencana strategi yang akan dilakukan, terutama yang berkaitan dengan bidang tugas serta lingkup Komisi VI DPR RI, yaitu Perindustrian, Perdagangan, Koperasi/Usaha Kecil dan Menengah (UKM), BUMN, Investasi, dan Persaingan Usaha.

Secara khusus, kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan yang dihadapi oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk, terkait peran perseroan ataupun perusahaan dalam hal proyek pembangunan jaringan gas yang telah dilakukan oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk di regional Provinsi Jawa Timur (Bojonegoro).



D. Agenda Kunjungan Kerja

Kunker Panja BUMN Energi Komisi VI DPR RI ke Provinsi Jawa Timur – Bojonegoro ini dilaksanakan dengan agenda pertemuan PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

E. Anggota Tim Kunjungan Kerja

Anggota Tim dalam pelaksanaan kegiatan Kunker Panja BUMN Energi Komisi VI DPR RI ke Provinsi Jawa Timur (Bojonegoro) adalah sebagai berikut:

NO.	NO. ANGG.	N A M A	KETERANGAN	FOTO
1.	A-103	MOHAMAD HEKAL, M.B.A.	PIMP. F-PGERINDRA	
2.	A-189	ARIA BIMA	PIMP. F-PDIP	
3.	A-209	SONNY T. DANAPARAMITA	F.PDIP	
4.	A-158	SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON	F.PDIP	
5.	A-268	LAMHOT SINAGA	F.PG	
6.	A-302	NUSRON WAHID	F.PG	
7.	A-396	MUHAMMAD RAFSEL ALI	F.PNASDEM	
8.	A-36	IR. H.M. NASIM KHAN	F.PKB	
9.	A-21	Drs. H. MOHAMMAD TOHA, S.Sos. M.Si.	F.PKB	
10.	A-536	Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI	F.PDEMOKRAT	
11.	A-409	RAFLI	F.PKS	
12.	A-416	Hj. NEVI ZUARINA	F.PKS	

13.	A-506	ABDUL HAKIM BAFAGIH	F.PAN	
14.	A-463	ELLY RACHMAT YASIN	F.PPP	

F. HASIL KUNJUNGAN

Hasil Kunjungan Kerja Panja BUMN Energi Komisi VI DPR RI ke Provinsi Jawa Timur (Bojonegoro) adalah sebagai berikut :

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK

a. Pengelolaan Jaringan Gas untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil (Jargas)

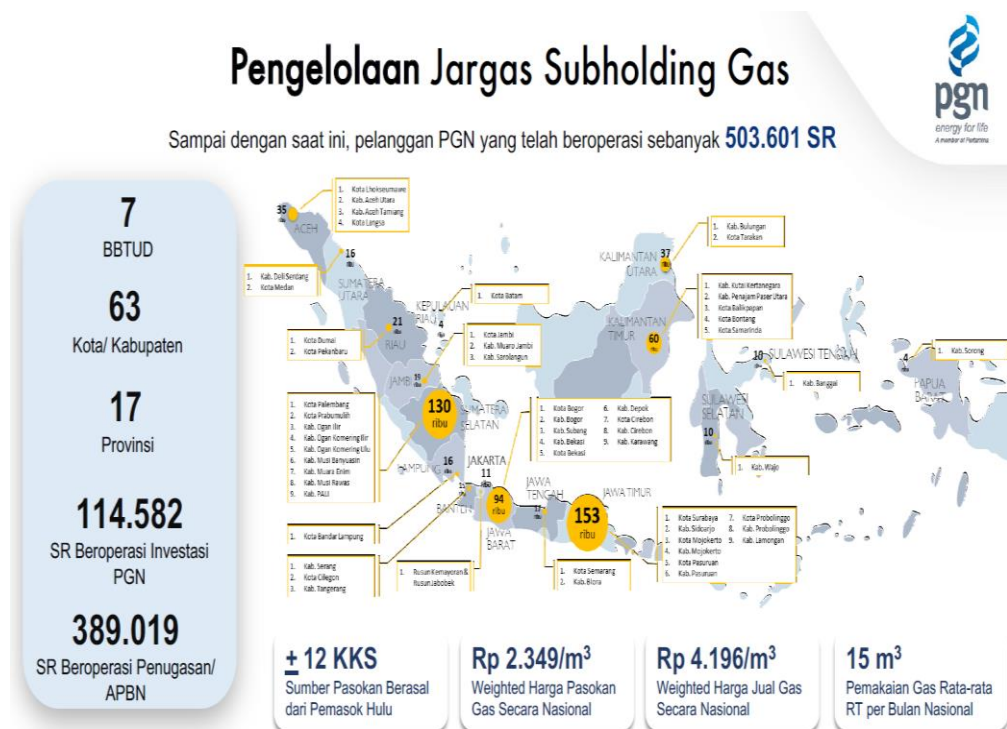
Pemerintah berencana membangun jaringan gas bumi untuk rumah tangga (jargas) pada tahun 2021 sebanyak 120.776 sambungan rumah (SR) yang tersebar di 21 kabupaten/kota. Jargas merupakan salah satu proyek strategis nasional, sebagai bentuk komitmen Pemerintah untuk menyediakan energi yang bersih dan murah bagi masyarakat, serta bersumber dari dalam negeri. Manfaat jargas antara lain mengkoreksi impor dan subsidi LPG yang kian tinggi dari tahun ke tahun, karena kemampuan produksi LPG hanya sekitar 25% dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Masyarakat juga mendapat benefit (jargas) dari pengurangan biaya yang dikeluarkan. Memang harga rata-rata jargas saat ini Rp 4.250 per meter kubik ekuivalen dengan harga LPG 3 kg. Namun dengan regulasi dan studi yang sedang dilaksanakan saat ini, jargas bisa dikembangkan ke aspek komersil dan industri melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, pembangunan jargas termasuk salah satu proyek strategis nasional. Ini merupakan upaya Pemerintah meningkatkan pemanfaatan gas

untuk dalam negeri, mengurangi impor LPG sebesar 603.720 ribu ton per tahun, penghematan subsidi LPG sebesar Rp 297,55 miliar per tahun, serta menghemat pengeluaran energi masyarakat Rp 386 miliar per tahun.

Kriteria suatu kota dapat dibangun jargas adalah ketersediaan suplai gas, ketersediaan infrastruktur gas dan adanya pasar. Hingga akhir 2019, jargas yang telah terbangun mencapai 400.269 sambungan rumah (SR) di 17 provinsi yang tersebar di 49 kabupaten/kota.



Gambar. 1 : Pengelolaan Jargas Subholding Gas

b. Pengembangan Jaringan Gas untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil (Jargas) APBN 2021

Untuk 2021, jargas yang akan dibangun ini berlokasi pembangunan jargas di Jawa Timur adalah Kabupaten Bojonegoro (10.000 SR), Kabupaten Lamongan (5.935 SR), Kota Surabaya

(6.088 SR), Kabupaten Sidoarjo (11.418 SR), Kota Mojokerto (5.699 SR), Kabupaten Mojokerto (5.935 SR), Kabupaten Jombang (6.137 SR), Kabupaten Pasuruan (5.750 SR), Kota Pasuruan (7.003 SR), Kabupaten Probolinggo (5.737 SR) dan Kota Probolinggo (5.080 SR).



Gambar. 2 : Pengembangan Jargas APBN Tahun 2021

c. Kegiatan *Safety Awareness* untuk Jargas

Potensi risiko program jargas dapat terjadi mulai dari masa konstruksi sampai pengoperasian dan Langkah antisipatif yang dilakukan PGN dalam menekan risiko tersebut antara lain dilakukan dengan:

- Pemberian stiker *safety* ke pelanggan.
- Sosialisasi dan edukasi *safety* ke masyarakat sekitar dan pengguna.
- Pemberian rambu-rambu jalur pipa gas.
- Pemberian patok jalur pipa gas.
- Pemberian zat *odorant* (pembau) ke gas untuk mengetahui apabila terjadi kebocoran.
- Patroli jaringan pipa gas.
- Kegiatan operasi dan pemeliharaan fasilitas jaringan.

- Layanan Contact Center.

d. Dukungan Pemerintah untuk Proyek Jargas

- Surat PGN ke Menteri ESDM tanggal 30 Desember 2020 perihal Permohonan Dukungan dalam Pelaksanaan Pengelolaan Jargas Penugasan dan Jargas Mandiri.
- Alokasi jangka panjang untuk Pelanggan Jargas dengan harga setinggi-tingginya USD2/MMBTU, dan dapat dipergunakan untuk moda CNG.
- Penetapan harga jual gas sesuai dengan keekonomian Badan Usaha dengan memperhitungkan seluruh biaya yang timbul pada saat pembangunan dan pengoperasian Jargas, serta dilakukan review secara berkala.
- Dukungan perizinan program jargas di Jawa Timur.
- Dilakukan sinergi distribusi LPG subsidi di wilayah jargas eksisting dan proyek yang akan datang.
- *Alignment* program kompor listrik dengan program pengembangan Jargas.

G. REKOMENDASI

Dari pertemuan yang dilakukan kepada PT Perusahaan Gas Negara Tbk, pada saat pelaksanaan kunjungan kerja Panja BUMN Energi ini, ada beberapa rekomendasi antara lain adalah sebagai berikut:

1. Panja BUMN Energi Komisi VI DPR RI merekomendasikan kepada PT Perusahaan Gas Negara Tbk untuk lebih terbuka lagi dalam memberikan data dan fakta yang terjadi dilapangan dalam pengerjaan proyek tersebut.
2. Panja BUMN Energi Komisi VI DPR RI merekomendasikan kepada PT Perusahaan Gas Negara Tbk untuk lebih meningkatkan jumlah sambungan rumah dan menggandeng perusahaan swasta menjadi jargas mandiri untuk tiap-tiap daerah.
3. Panja BUMN Energi Komisi VI DPR RI merekomendasikan kepada PT Perusahaan Gas Negara Tbk untuk pencadangan gas harus seimbang agar tidak terjadi dua sisi yang merugikan .

4. Panja BUMN Energi Komisi VI DPR RI merekomendasikan PT Perusahaan Gas Negara Tbk untuk menghitung ulang terkait penggunaan listrik dan jargas agar bisa mengetahui secara komperatifnya jargas jauh lebih murah atau tidak.
5. Panja BUMN Energi Komisi VI DPR RI merekomendasikan agar PT Perusahaan Gas Negara Tbk untuk di rumuskan secara serius, komperehensif dan secara terintegrasi dari hulu dan hilir agar mengetahui hubungannya satu sama lain.
6. Panja BUMN Energi Komisi VI DPR RI merekomendasikan agar PT Perusahaan Gas Negara Tbk agar memberikan informasi kepastian selesainya proyek jaringan gas dan informasi kontribusi produksi gas terhadap kebutuhan gas nasional yang sebenarnya.
7. Panja BUMN Energi Komisi VI DPR RI merekomendasikan kepada PT Perusahaan Gas Negara Tbk untuk lebih serius dalam memberikan solusi penanganan apabila terjadi resiko hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terjadi ledakan pipa gas, dll.
8. Panja BUMN Energi Komisi VI DPR RI merekomendasikan agar PT Perusahaan Gas Negara Tbk untuk saling berkoordinasi dengan BUMN terkait dan pemerintah dalam proyek tersebut.

**KETUA TIM KUNKER PANJA BUMN ENERGI KOMISI VI DPR RI
KE PROVINSI JAWA TIMUR (BOJONEGORO)**

TTD.

**ARIA BIMA
A – 189**

H. DOKUMENTASI KEGIATAN

